

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional (Mu'min, 2023). Konsep ini menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian melibatkan pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga mencakup investasi, perubahan tabungan serta struktur ekonomi (Muslimah & Indrawati, 2022). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara, Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan dapat digunakan sebagai indikator utama.

Di Indonesia, salah satu instrumen strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Kawasan Ekonomi Khusus didefinisikan sebagai kawasan tertentu yang dibatasi oleh Undang-Undang dan berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ketentuan khusus dibidang perbankan, perpajakan, perijinan, keimigrasian dan ketenagakerjaan (Indah Fadila, 2024). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kawasan Ekonomi Khusus memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi ketimpangan antar wilayah.

Konsep pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sebelumnya, kebijakan serupa telah diterapkan di Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti tempat penimbunan berikat (PP Nomor 33 Tahun 1996), Kawasan Industri (Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996), Kawasan Ekonomi Terpadu/KAPET (Keputusan Presiden No.150 Tahun 2000). Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas (UU Nomor 36 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2007). Kawasan Ekonomi Khusus diyakini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, baik dari domestik maupun internasional. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk lokal, membuka peluang kerja baru sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran, serta meningkatnya daya beli masyarakat (Misbahuddin et al., 2023).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tahun 2024, terdapat 20 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan fokus pengembangan pada sektor-sektor strategis seperti Industri, digital, pariwisata, serta jasa lainnya. Setiap sektor Kawasan Ekonomi Khusus memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sesuai dengan keunggulan wilayahnya. Misalnya, Kawasan Ekonomi Khusus di sektor Industri berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan mendorong ekspor. Sektor ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional, mengingat kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan perbaikan neraca perdagangan. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah sekitarnya, tetapi juga mendorong terjadinya transformasi

ekonomi di tingkat nasional. Tabel berikut menyajikan daftar Kawasan Ekonomi Khusus di sektor Industri beserta lokasinya dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Tabel 1. 1 Kontribusi Sektor Industri Pada 10 Kawasan Ekonomi Khusus Periode 2017-2023 (Persen)

Kab./Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
KEK (Kab. Gresik)	47,99	47,78	47,95	49,59	49,96	49,44	50,39	49,01
KEK (Kab. Kendal)	41,48	41,79	41,80	42,29	42,27	41,94	41,74	41,90
KEK (Kab. Simalungun)	12,37	12,40	12,00	11,54	11,58	11,20	10,49	11,65
KEK (Kab. Bintan)	39,26	39,02	39,11	40,39	40,9	41,50	40,25	40,06
KEK (Kota Bitung)	33,63	32,62	30,48	32,88	35,68	36,15	36,4	33,98
KEK (Kab. Aceh Utara)	9,73	9,69	8,71	8,44	8,04	7,16	6,89	8,38
KEK (Kab. Pulau Morotai)	4,61	4,38	4,15	4,03	3,45	3,42	3,48	3,93
KEK (Kab. Kutai Tiimur)	3,01	2,98	2,93	3,55	3,38	2,55	3,22	3,09
KEK (Kab. Sorong)	43,82	44,52	42,46	43,16	42,99	42,71	44,20	43,41
KEK (Kota Palu)	7,55	6,87	6,28	6,58	6,48	6,31	5,96	6,58

Sumber : Laporan Perkembangan KEK 2024, BPS (2024)

Sebagai bahan perbandingan, tabel berikut menyajikan daftar kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB di sektor industri, di luar kawasan ekonomi khusus. Kontribusi ini berasal dari berbagai sektor industri unggulan, seperti industri pengolahan, dan Industri, yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Daerah-daerah ini memiliki daya saing tinggi berkat keberadaan kawasan industri strategis, investasi yang signifikan, serta akses infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor industri.

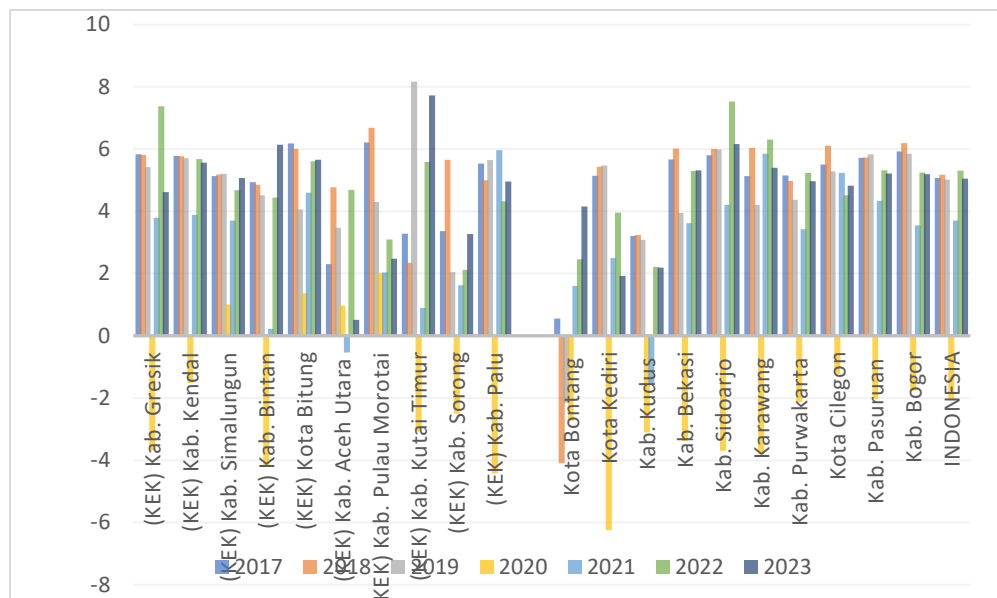
Tabel 1.2 Kontribusi Sektor Industri Di 10 Kabupaten/Kota Industri periode 2017-2023 (Persen)

Kab./Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Kota Bontang	83,93	82,26	80,63	79,28	79,42	78,73	78,37	80,37
Kota Kediri	81,28	81,53	82,04	82,13	81,88	81,04	79,99	81,41
Kab. Kudus	80,85	80,63	80,41	81,07	79,74	78,63	78,10	79,92
Kab. Bekasi	78,27	78,28	77,74	77,20	77,21	77,37	77,46	77,65
Kab. Sidoarjo	46,11	46,72	47,86	51,17	51,96	50,02	48,61	48,92
Kab. Karawang	71,99	71,70	70,63	69,87	70,81	71,38	70,92	71,04
Kab. Purwakarta	58,08	57,99	57,18	56,96	57,6	58,25	58,34	57,77
Kota Cilegon	54,75	54,39	54,16	54,87	55,40	54,99	55,29	54,84
Kab. Pasuruan	56,31	57,05	57,68	58,97	60,25	60,42	60,42	58,73
Kab. Bogor	54,20	54,13	54,03	53,72	53,18	52,99	52,41	53,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan rata-rata kontribusi sektor Industri terhadap PDRB selama periode 2017-2023, kabupaten/kota di luar Kawasan Ekonomi Khusus memiliki kontribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kabupaten/kota industri seperti Kota Kediri (81,41%), Kota Bontang (80,37%), dan Kabupaten Kudus (79,92%) menunjukkan dominasi sektor industri yang kuat, sementara KEK dengan kontribusi tertinggi, seperti KEK Gresik (49,01%) dan KEK Sorong (43,41%), masih berada jauh di bawahnya. KEK dengan kontribusi terendah, seperti KEK Morotai (3,93%) dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (3,09%), menunjukkan bahwa sektor industri belum berkembang secara signifikan di wilayah tersebut. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus belum serta-merta menjamin dominasi sektor Industri, dan masih diperlukan strategi pengembangan yang lebih optimal untuk meningkatkan daya saing industri di Kawasan Ekonomi Khusus.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator utama dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Pembangunan. Pembangunan yang berjalan secara optimal diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui peningkatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Muslimah & Indrawati, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten/Kota Dalam Angka, 2024)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Di KEK Dan Kabupaten/Kota Industri Periode 2017-2023

Ekonomi Indonesia menunjukkan tren penurunan, dari 5,31% pada 2022 menjadi 5,05% pada 2023. Selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, hampir semua Kawasan Ekonomi Khusus mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Namun, pemulihan mulai terlihat sejak 2021. Sebagian besar KEK, seperti Galang Batang, Palu, dan Bitung mencatat perbaikan signifikan pada 2023, dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 6,14%, 4,96%, dan 5,66%. KEK

Malay Batuta Trans Kalimantan (MBTK) bahkan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,72% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa KEK dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, beberapa KEK seperti Arun Lhokseumawe dan Morotai masih menunjukkan pertumbuhan rendah, masing-masing 0,51% dan 2,48% pada 2023, mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan performa dan mengurangi ketimpangan antar Kawasan Ekonomi Khusus. sehingga Kawasan Ekonomi Khusus dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Wilayah dengan basis Industri, seperti Kabupaten Sidoarjo, Karawang, dan Bekasi, menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik dengan pertumbuhan stabil di atas 5% selama 2023. Sidoarjo mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 6,16%, sementara Karawang dan Bekasi masing-masing mencapai 5,4% dan 5,32% pada tahun yang sama. Ketahanan sektor Industri di daerah ini menunjukkan daya saing yang tinggi dalam menghadapi krisis. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kudus mengalami pemulihan yang lebih lambat. Kota Bontang baru mencatat pertumbuhan stabil sebesar 4,16% pada 2023, sementara Kudus tetap berada di bawah 3%, meskipun ada perbaikan bertahap setelah kontraksi pada 2020. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan bertahan antar wilayah yang bergantung pada basis ekonomi masing-masing, di mana daerah dengan sektor Industri yang kuat cenderung lebih tahan terhadap krisis.

Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah berbasis Industri menunjukkan pola pemulihan setelah krisis pandemi, terdapat perbedaan yang mencolok dalam stabilitas dan ketahanan ekonominya. Kawasan Ekonomi Khusus cenderung

menghadapi fluktuasi yang lebih besar, dengan pertumbuhan yang sangat bergantung pada diversifikasi sektor dan investasi. Sebaliknya, wilayah berbasis Industri lebih stabil dan menunjukkan ketahanan yang tinggi dalam menghadapi krisis, berkat kontribusi sektor Industri yang kuat terhadap ekonomi lokal. Maka dari itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih efektif serta perhatian khusus terhadap wilayah dengan performa rendah, baik di Kawasan Ekonomi Khusus maupun wilayah Industri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Kawasan Ekonomi Khusus memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki infrastruktur, realisasi pertumbuhannya masih menunjukkan perbedaan antar wilayah. Beberapa Kawasan Ekonomi Khusus industri berkembang pesat, sementara yang lain masih mengalami kendala dalam menarik investasi dan menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten yang meskipun tidak memiliki status Kawasan Ekonomi Khusus, tetapi mampu memberikan kontribusi besar dalam sektor industri. Kabupaten-kabupaten ini berkembang secara mandiri dengan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebijakan daerah yang mendukung iklim usaha dan investasi industri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Kawasan Ekonomi Khusus benar-benar lebih unggul dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kabupaten industri yang berkembang secara alami tanpa intervensi kebijakan khusus.

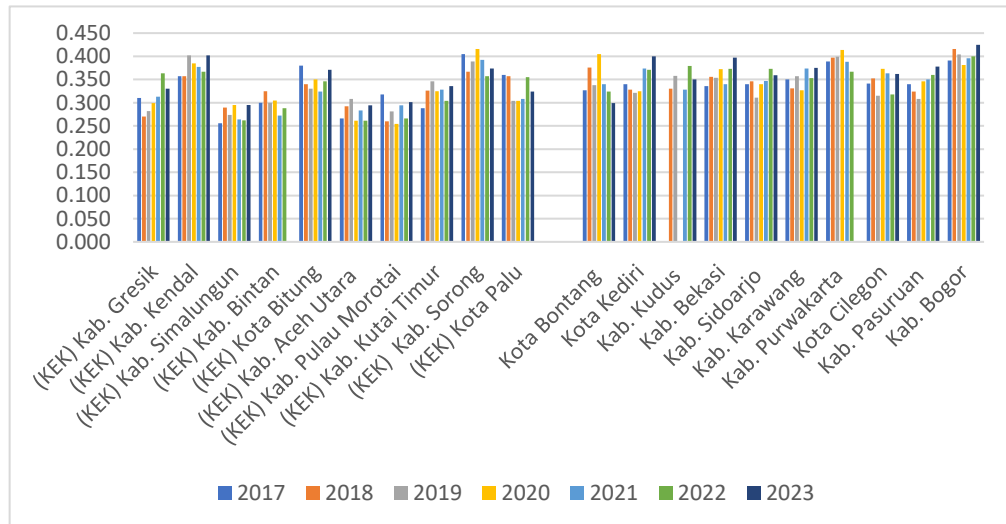
Dalam konteks pembangunan, Kawasan Ekonomi Khusus dan kabupaten/kota industri memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, serta

penguatan sektor industri. Namun, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tidak hanya bergantung pada faktor-faktor tersebut, tetapi juga oleh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan pendidikan yang dalam hal ini direpresentasikan oleh rata-rata lama sekolah. Ketiga faktor ini menjadi isu penting karena dapat mencerminkan sejauh mana sejauh mana hasil dari pertumbuhan ekonomi mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam konteks pengembangan wilayah, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus maupun di Kabupaten/Kota Industri. Ketimpangan ini dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai rasio gini yang menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Di mana jika semakin besar rasio gini di suatu daerah, maka semakin lebar kesenjangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut (Rahmadi & Parmadi, 2019).

Teori Kuznet menyatakan bahwa dalam jangka pendek, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yang berarti pertumbuhan ekonomi cenderung diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya berbalik menjadi negatif, yang berarti pertumbuhan ekonomi justru diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan pendapatan (Fameylan Alin et al., 2019). Hal ini sejalan dengan hipotesis *Kuznets Curve* (U) yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada fase

awal pembangunan, tetapi seiring dengan tercapainya tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan menjadi lebih merata (Nazipawati, 2019).



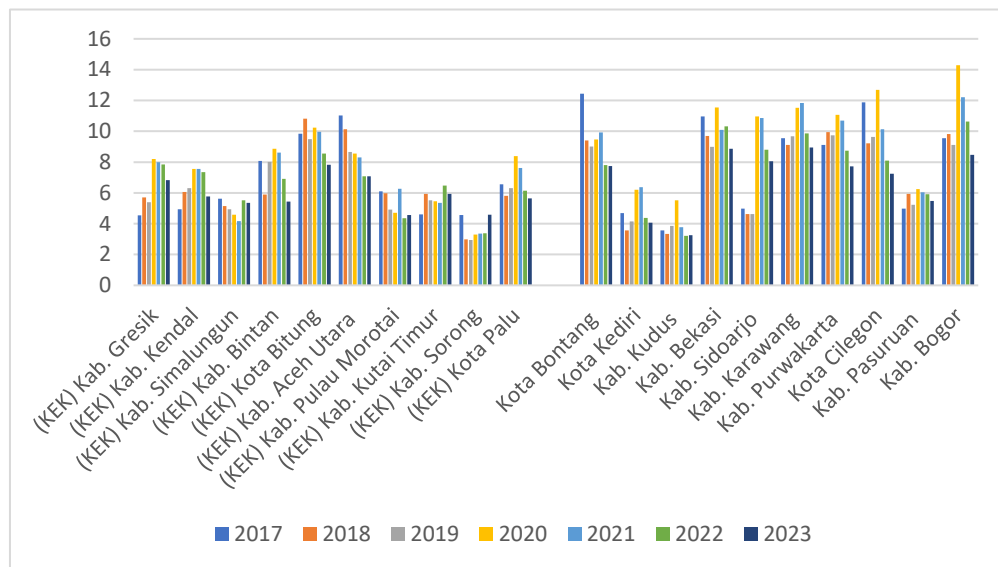
Sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten/Kota Dalam Angka, 2024)

Gambar 1. 2 Ketimpangan Pendapatan Di KEK dan Kabupaten/Kota Industri Periode 2017-2023

Data ketimpangan pendapatan di berbagai kabupaten/kota dari tahun 2017 hingga 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan pola berbeda di tiap daerah. Kabupaten di Kawasan Ekonomi Khusus, seperti Kabupaten Simalungun, Kabupaten Aceh, dan Kabupaten Gresik memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah yaitu di bawah 0,3, yang mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan yang cukup merata. Sebaliknya, Kabupaten Sorong, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Bitung menunjukkan angka ketimpangan yang lebih tinggi di bandingkan wilayah lain. Kabupaten Sorong menunjukkan tren perbaikan dalam distribusi pendapatan sebelum akhirnya meningkat lagi pada tahun 2023, mencapai 0,374. Kabupaten Kendal mencatatkan ketimpangan tertinggi pada tahun 2019 dan mencapai 0,402 pada 2023. Sementara itu, Kabupaten Bitung mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir, hingga mencapai 0,371 pada tahun 2023.

Di sisi lain, wilayah industri utama seperti Kabupaten Bekasi menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dari 0,336 pada 2017 menjadi 0,373 pada 2023. Kabupaten Karawang juga mengalami kenaikan ketimpangan dari 0,331 pada 2018 menjadi 0,357 pada 2019, sebelum sedikit menurun menjadi 0,353 pada 2023. Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi ketimpangan dari 0,346 pada 2017 hingga 0,373 pada 2022, sementara Kota Cilegon menunjukkan ketimpangan yang relatif stabil, berkisar antara 0,341 hingga 0,346 dari 2017 hingga 2023. Secara keseluruhan beberapa wilayah Kawasan Ekonomi Khusus mengalami penurunan ketimpangan, sementara Kabupaten/Kota Industri cenderung mempertahankan tren yang lebih stabil.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak luput dari masalah pengangguran sebagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Pengangguran menjadi salah satu masalah penting yang dihadapi oleh suatu perekonomian (Arifin & Fadlan, 2021). Tingginya tingkat pengangguran dapat mengurangi produktivitas, sehingga dapat menimbulkan dampak sosial, dan politik yang besar. Pengangguran yang tinggi menandakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang tidak hanya berdampak negatif terhadap pendapatan masyarakat, tetapi juga mengurangi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Arthur Okun, ada hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran (Pahaludin et al., 2024). Oleh karena itu, pengangguran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten/Kota Dalam Angka, 2024)

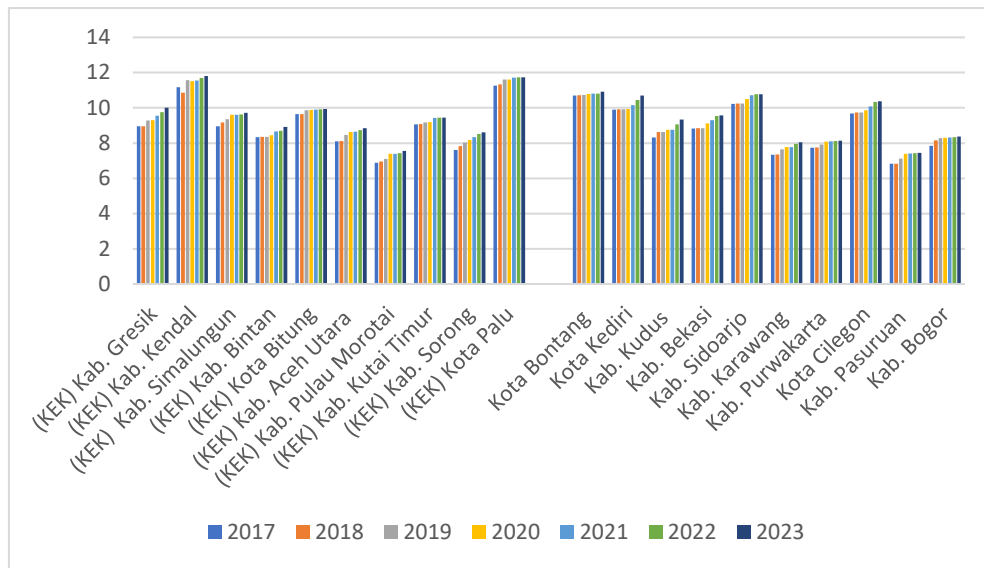
Gambar 1. 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Di KEK dan Kabupaten/Kota Industri Periode 2017-2023

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan pola fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Hal ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap lapangan kerja, terutama di kawasan yang bergantung pada sektor industri dan pariwisata. Kota Bitung dan Kabupaten Aceh Utara memiliki tingkat pengangguran yang konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Kota Bitung memiliki TPT yang relatif tinggi, dengan lonjakan besar di 2020 mencapai 10,23 sebelum turun menjadi 7,82% pada 2023, dan Kabupaten Aceh Utara memiliki TPT yang relatif tinggi, tahun 2017 mencapai 11,02 meskipun terjadi penurunan tetapi memiliki TPT 7,07% pada 2023 yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sementara itu, di daerah industri, Kabupaten Bekasi mengalami penurunan TPT dari 10,37% (2017) menjadi 10,31% (2022), yang mencerminkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor Industri. Kabupaten Karawang, yang merupakan pusat industri besar, mengalami lonjakan TPT pada 2020 mencapai 11,52% sebelum turun ke 8,95% pada 2023. Kabupaten Bogor, sebagai daerah

dengan sektor industri yang berkembang, sempat mengalami lonjakan pengangguran hingga 14,29% pada 2020 sebelum turun ke 8,47% pada 2023. Secara umum, Kabupaten/Kota Industri memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan Kawasan Ekonomi Khusus, menunjukkan bahwa meskipun sektor industri berkontribusi besar terhadap ekonomi, penyerapan tenaga kerja tetap menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi disrupsi ekonomi seperti pandemi.

Dalam teori human menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas diyakini mampu memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan, khususnya dalam aspek ekonomi (Hepi & Wiwin Zakiah, 2018). Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin besar kemungkinan masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang berujung pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori modal manusia, pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi yang berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Kabupaten/Kota Dalam Angka, 2024)

Gambar 1.4 Rata-Rata Lama Sekolah Di KEK Dan Kabupaten/Kota Industri Periode 2017-2023

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2017 hingga 2023 di beberapa wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dan kabupaten/kota industri, secara umum terlihat adanya tren peningkatan tingkat pendidikan penduduk yang stabil dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam akses terhadap pendidikan dan keberhasilan program pembangunan sumber daya manusia di daerah-daerah tersebut. Meskipun, peningkatannya berlangsung dengan kecepatan yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Wilayah-wilayah dalam Kawasan Ekonomi Khusus menunjukkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang bervariasi. Kabupaten Kendal tercatat sebagai salah satu daerah dengan rata-rata lama sekolah tertinggi, meningkat dari 11,18 tahun pada 2017 menjadi 12,21 tahun pada 2023. Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 8,95 menjadi 10,01 tahun. Kabupaten Bintan dan Kabupaten Simalungun mencatat peningkatan serupa, meskipun nilai rata-rata lama sekolah mereka masih di bawah Kabupaten Kendal. Sementara itu, beberapa Kawasan Ekonomi Khusus lainnya seperti Kabupaten Pulau Morotai dan

Kabupaten Sorong masih menunjukkan nilai rata-rata lama sekolah yang relatif rendah pada 2023, yaitu 7,52 tahun dan 8,64 tahun secara berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa tantangan dalam pemerataan pendidikan masih menjadi isu penting di sebagian wilayah Kawasan Ekonomi Khusus, khususnya yang berada di wilayah timur dan kepulauan.

Untuk wilayah kabupaten/kota industri, peningkatan rata-rata lama sekolah juga tampak cukup konsisten. Kota Bontang, misalnya, mencatatkan rata-rata lama sekolah sebesar 10,7 tahun pada 2017 dan meningkat menjadi 10,92 tahun pada 2023. Kabupaten Sidoarjo mencatat rata-rata lama sekolah sebesar 10,75 tahun di tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah Kawasan Ekonomi Khusus. Kota Kediri dan Kabupaten Bekasi juga menunjukkan peningkatan yang stabil, mencapai di atas 9 tahun pada 2023. Namun demikian, terdapat pula beberapa wilayah non-Kawasan Ekonomi Khusus dengan Rata-Rata Lama Sekolah rendah, seperti Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Purwakarta yang masih berada di bawah 8 tahun pada 2023.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun wilayah Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan mampu mendorong pembangunan manusia, termasuk pendidikan, namun belum semua Kawasan Ekonomi Khusus menunjukkan keunggulan dalam hal Rata-Rata Lama Sekolah dibandingkan kabupaten/kota industri. Bahkan beberapa wilayah kabupaten/kota industri memiliki pencapaian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus perlu disertai dengan penguatan layanan pendidikan, khususnya pada wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas, agar manfaat pembangunan ekonomi dapat diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi dinamika pertumbuhan, baik dari sisi ekonomi makro maupun karakteristik sosial wilayah, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan kepadatan penduduk dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai variabel kontrol. Kepadatan penduduk dapat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi suatu daerah, di mana tingkat kepadatan yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi domestik, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dan sumber daya. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mencerminkan kebijakan upah minimum yang bertujuan melindungi pekerja dari upah yang tidak layak. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat mendorong daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak sejalan dengan produktivitas tenaga kerja, hal ini dapat menurunkan minat investor dan mengurangi serapan tenaga kerja.

Penelitian sebelumnya yang membahas pertumbuhan ekonomi dengan variabel independen seperti ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, seta rata-rata lama sekolah, menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Haya et al., 2022) ditemukan pengaruh signifikan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian lain (Rahmadi & Parmadi, 2019) menunjukkan pengaruh negatif antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian terkait pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan (Arifin &

Fadllan, 2021) menemukan pengaruh negatif namun tidak signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian (Jeray et al., 2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yakni terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian mengenai rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan (Swastika, U. & Arifin, 2023) menemukan pengaruh positif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh (Kumayas et al., 2024) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan hasil penelitian dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penelitian satu dengan lainnya. Beberapa penelitian menemukan hubungan yang signifikan, sementara lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya analisis yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan rata-rata lama sekolah memengaruhi pertumbuhan ekonomi di sepuluh kabupaten yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus serta membandingkannya dengan Kabupaten/Kota industri. Dengan perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dibandingkan dengan wilayah industri di luar Kawasan Ekonomi Khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri?
2. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri?
3. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri?
4. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai variabel kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri?
5. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah kepadatan penduduk dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri.

3. Menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri.
4. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan kabupaten/kota industri.
5. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan rata-rata lama sekolah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini akan memberikan pedoman bagi pemerintah dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus serta Kabupaten/Kota Industri dalam merancang strategi pengembangan kawasan yang lebih tepat, terutama dalam hal pengurangan ketimpangan pendapatan, Pengurangan pengangguran, dan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan tentang pentingnya mengintegrasikan faktor sosial-ekonomi dalam pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek investasi tetapi juga keberlanjutan sosial.
3. Menyediakan data dan analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota Industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks hubungan antara ketimpangan pendapatan, pengangguran, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kabupaten/Kota industri. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran ketiga variabel tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah dengan karakteristik industri yang kuat.
2. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman mengenai dinamika yang terjadi dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan pengaruhnya terhadap ekonomi regional dan nasional.
3. Menjadi referensi dan landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas aspek serupa atau terkait, baik dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus maupun wilayah lainnya.